



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 562811 PSW 1302

Surel : biro.perekonomian@jogjaprov.go.id

Laman : <https://biroperekonomian.jogjaprov.go.id/>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Kepala Biro Administrasi Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Setda DIY,

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si..
NIP 196606041993032007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam”:
 - Diukur dengan indikator persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 (persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Perekonomian dan Pembangunan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
 - Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan RB dengan kategori A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM

aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;

2. kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi. Road map tersebut diharapkan dapat mendeksripsikan arah perubahan ke dalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi.
4. pemulihan pasca bencana pandemi dan wabah penyakit Covid-19 yang menuntut sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi peyebaran dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal COVID-19 .

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 <i>Cascading</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3 Isu-isu Strategis	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran	8
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	11
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	24
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	56
3.3. Efisiensi Anggaran	60
3.4. Inovasi	61
BAB IV Penutup	76

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi	8
Tabel I.2 Sarana dan Prasarana	9
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023	10
Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	11
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan	13
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	16
Tabel II.4 Struktur Program dan kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	18
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023	21
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023	22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian	26
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	32
Tabel III.6 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	33
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	50
Tabel III.11 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	51
Tabel III.12 Kontribusi Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	56
Tabel III.13 Kontribusi Program Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	58
Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	60
Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	65

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi	3
Gambar I.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan	4
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring, dan Evaluasi E-SAKIP	23
Gambar III.1 Rapat Koordinasi Daerah TPID DIY	36
Gambar III.2 Kegiatan TPAKD DIY Implementasi KEJAR	37
Gambar III.3 Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi	38
Gambar III.4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 di Kalurahan Bejiharjo	42
Gambar III.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 di Kalurahan Bejiharjo	47
Gambar III.6 Panen Padi Aplikasi Biosaka	48

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

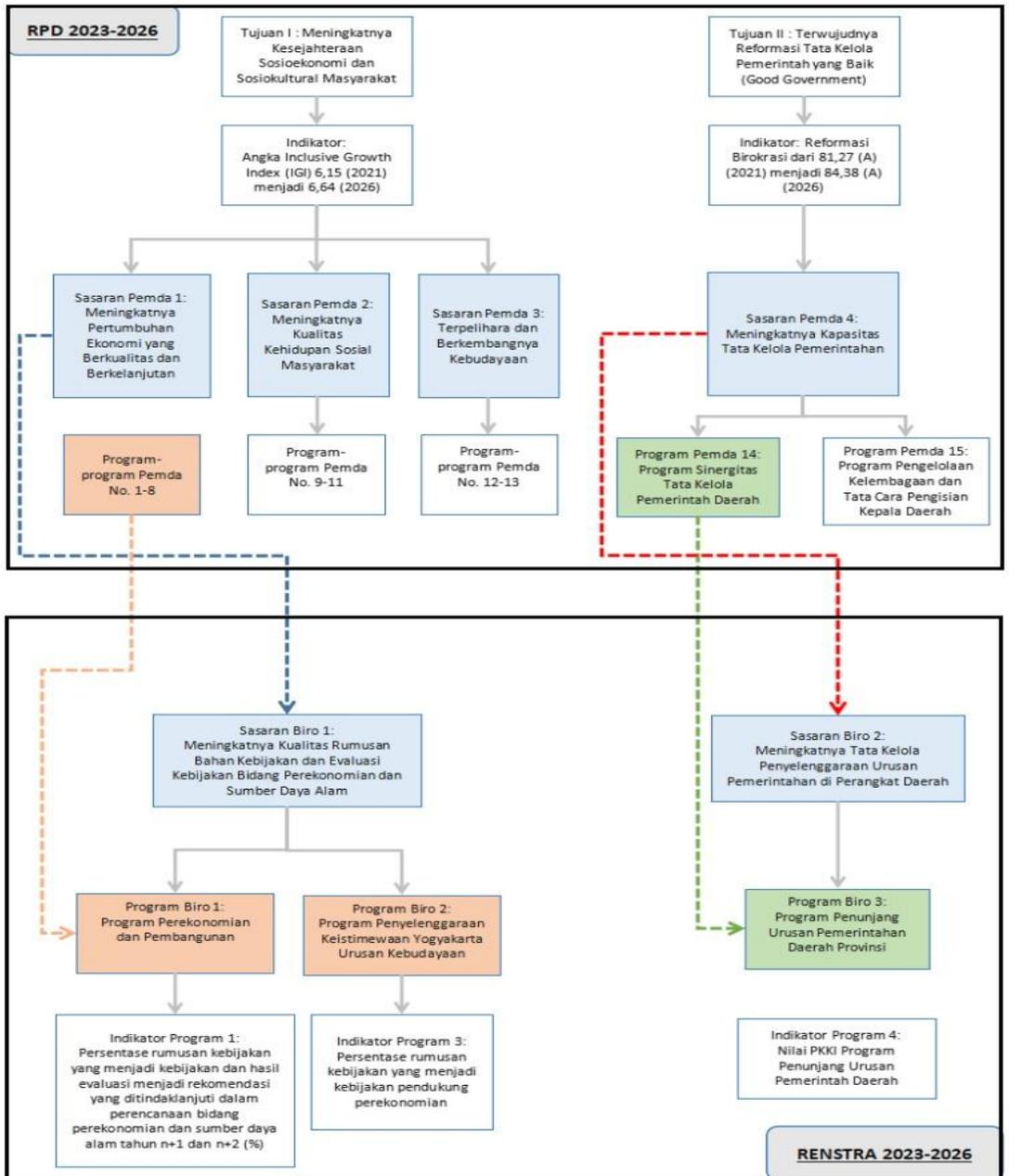
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

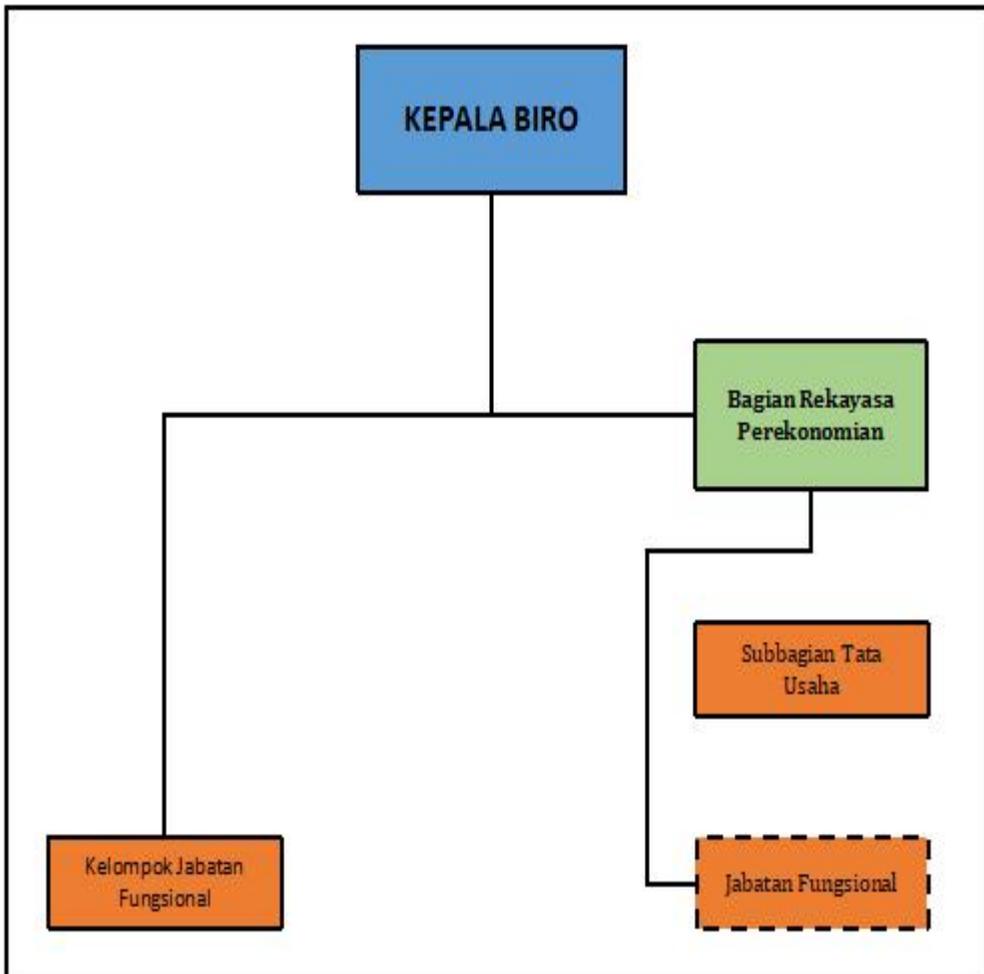
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 - 2026. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Biro Asministrasi Perekonomian dan SDA 2023-2026

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Biro;
2. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
3. pengoordinasian perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
5. pengoordinasian rumusan bahan kebijakan strategis badan usaha milik daerah;
6. evaluasi rumusan bahan kebijakan strategis badan usaha milik daerah;
7. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
8. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
9. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sesuai Pelaksanaan tugas, fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro 2. Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan b. Jabatan Fungsional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Perekonomian. 2. Analis Pembangunan. 3. Analis Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian; dan 4. Pengadministrasi Umum. 5. Analisis Kelautan dan Perikanan. 6. Analis Pengembangan Potensi Daerah; dan 7. Pengadministrasi Umum. 8. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 9. Pengelola Akuntansi; 10. Pengadministrasi Kepegawaian; 11. Pengelola Gaji; 12. Pengadministrasi Keuangan; 13. Pengelola Barang Milik Negara; 14. Pranata Kearsipan; 15. Verifikator Data Laporan Keuangan; 16. Pengadministrasi Persuratan; 17. Bendahara; dan 18. Pengemudi.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis pada sektor-sektor yang berada di dalam lingkup tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait dengan perumusan kebijakan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian

- 1) percepatan Ekspor Produk Pertanian;
- 2) pengembangan perbenihan untuk meningkatkan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- 3) pemberdayaan dan penguatan lembaga petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan;
- 4) keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian dalam arti luas;
- 5) peningkatan NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal dikarenakan usaha pertanian dan perikanan yang belum efisien;
- 6) adanya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik;
- 7) ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras cukup tinggi;
- 8) kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum terjamin mutu dan keamanannya, antara lain masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya;
- 9) belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan;
- 10) pencemaran, kerusakan alam dan resiko bencana alat;
- 11) penguatan sektor produksi berbasis pertanian dan perikanan yang adaptif bagi komunitas usaha tani menghadapi pandemi Covid-19;
- 12) pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Ekonomi Hijau;
- 13) hilirisasi ke industri berbasis revitalisasi lahan pertanian berkelanjutan;
- 14) pengembangan manajemen rantai nilai produk pertanian dan perikanan;
- 15) pengembangan teknologi pertanian dalam arti luas;
- 16) pengembangan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas;
- 17) pengembangan pertanian dalam arti luas untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan pendidikan;

- 18) penyediaan infrastruktur strategis dan sarana prasarana pendukung pertanian dan perikanan terutama di kawasan pesisir selatan belum optimal; dan
- 19) belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan berbasis kawasan sentra produksi.

b. Stabilitas Perekonomian Daerah

- 1) menjaga stabilitas rantai pasok baik di saat pandemi Covid-19 maupun tidak;
- 2) stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi;
- 3) pengembangan pasar tradisional yang mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) pengembangan nilai ekspor komoditi unggulan DIY;
- 5) Peningkatan daya saing produk melalui pengembangan inovasi produk;
- 6) regulasi pasar modern;
- 7) pengembangan dan pemberdayaan SDM serta kelembagaan Koperasi dan UKM (KUKM); dan
- 8) pengembangan lembaga keuangan dan skema pembiayaan bagi KUKM.

c. Rekayasa Perekonomian

- 1) pemulihan Kegiatan perekonomian di sektor Pariwisata, penanaman modal, dan ekonomi kreatif akibat dampak pandemi Covid-19;
- 2) peningkatan kompetensi dan SDM Pelaku Usaha Pariwisata;
- 3) memperkaya variasi kunjungan wisata (berbasis budaya, alam, desa wisata, dan lain-lain);
- 4) menyusun konektivitas antardestinas pariwisata dan kawasan strategis pariwisata (tourism transportation inline integrated);
- 5) menyiapkan akses, atraksi, dan fasilitas pendukung pariwisata;
- 6) memperkuat kemitraan dengan komunitas pariwisata;
- 7) pengembangan ekonomi kreatif;
- 8) pengoptimalan peluang waktu tinggal kunjungan wisatawan di DIY;
- 9) pengembangan inovasi produk pariwisata dan jenis produk pendukung pariwisata;
- 10) UU Ciptaker dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasca diterbitkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diikuti dengan diterbitkannya peraturan perundangan pelaksanaannya;

- 11) ketersediaan lahan yang semakin sempit untuk proyek-proyek besar dan infrastruktur pendukung;
- 12) kerja sama daerah dengan pihak luar negeri yang dapat meningkatkan perekonomian daerah (sister province, kerja sama teknik luar negeri, dan kerja sama dengan lembaga luar negeri);
- 13) pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Pemda DIY;
- 14) peningkatan promosi investasi secara terpadu;
- 15) belum optimalnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY;
- 16) masih tingginya angka pengangguran terdidik dan belum link & match antara vokasi dan produktivitas (supply dan demand);
- 17) perlunya kesempatan kerja sektor informal untuk pemenuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja DIY;
- 18) tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja;
- 19) meningkatnya angka pengangguran terdidik;
- 20) perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi, dan pengembangan produktivitas;
- 21) perlunya penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
- 22) perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	3				1	1				1	
	2. Pengawas	6		6			1	1					1
	3. Pelaksana	32		7	11	1	18	6	8	2	2	8	10
C.	Jabatan Fungsional	10					6	5	1			4	2
	Jumlah	52	4	13	11	1	27	14	9	2	2	13	14

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (51,85%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang (33,33 %), D3 2 orang (7,41 %), SLTA 2 orang (7,41 %). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, yaitu 14 orang perempuan dan 13 orang laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang pelaksana, namun dengan adanya pegawai PPPK DIY sejumlah 7 orang cukup membantu pelaksanaan pekerjaan. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan pegawai, Biro administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai SDM dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan persyaratan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai. Berdasarkan table I.1 di atas terdapat 6 orang pegawai pelaksana yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, tetapi masih terdapat 4 pegawai pelaksana yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan, akan tetapi karena factor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Tabel I.2 Sarana dan Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1.	Alat-alat Angkutan	8	Rp 1.119.150.314
2.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	226	Rp 896.785.193
3.	Alat-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8	Rp 35.410.000
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	Rp 4.500.000
5.	Komputer	63	Rp 393.995.520
Aset Tetap Lainnya			
1.	Bahan Perpustakaan	409	Rp 23.439.000
Aset Lainnya			
1.	Aset Tidak Berwujud	4	Rp 195.445.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Jumlah	719	Rp 2.668.725.027

Sumber: Data Neraca Biro 31 Desember 2023 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 1.723.363.300	Rp 1.690.076.600	(Rp 33.286.700)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp 42.360.000	Rp 42.360.000	Rp 0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.681.003.300	Rp 1.647.716.600	(Rp 33.286.700)
5 1 05	Belanja Hibah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5 2	BELANJA MODAL	Rp 527.824.500	Rp 500.199.500	(Rp 27.625.000)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 527.824.500	Rp 500.199.500	(Rp 27.625.000)
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 0	Rp 0
	Jumlah Belanja	Rp 2.251.187.800	Rp 2.190.276.100	(Rp 60.911.700)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023

Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA semula Rp 2.251.187.800 dan mengalami perubahan menjadi Rp 2.190.276.100 atau berkurang Rp 60.911.700. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor 700/01033 Tanggal 13 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY.</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>a. menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga pada masa selanjutnya kinerja yang telah dicapai dapat ditingkatkan; dan</p> <p>b. meningkatkan peran sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah DIY.</p>	<p>Pada tahun N-1 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sudah melakukan perencanaan kinerja, dan pengukuran kinerja, setiap bulannya internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruhi setiap kegiatan agar pencapaian realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Diharapkan ke depan hasil atas implementasi SAKIP di Biro dapat lebih meningkat.</p>

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat Daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY selama empat tahun adalah:

“Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju, dan sejahtera”.

Adapun sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat DIY, 2023 - 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	BB	BB	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Stabilitas Rantai Pasok Pangan dari hulu ke hilir 2. Menjaga kestabilan harga 3. Standarisasi produk melalui sertifikasi dan perlindungan HAKI bagi IKM 4. Peningkatan Sarana dan prasarana usaha pertanian dalam arti luas, industri, serta pariwisata 5. Perbaikan manajemen kelembagaan, penguasaan teknologi serta kemudahan akses permodalan dan akses pemasaran bagi UKM, termasuk di bidang pertanian 6. Peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha perekonomian melalui standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan produktivitas 7. Menjadikan destinasi dan event berkelas dunia dengan dukungan regulasi, standar atraksi, amenitas, aksesibilitas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pusat Grosir Pangan 2. Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha 3. Penumbuhan wirausaha baru dan IKM 4. Penumbuhan ketersediaan bahan baku 5. Penciptaan daya saing usaha 6. Penyusunan perencanaan strategis pengembangan Kawasan Ekonomi 7. Pengendalian stabilisasi harga 8. Perbaikan kelembagaan koperasi 9. Menumbuhkan kemampuan ekonomi inklusif melalui penumbuhan kewirausahaan baru dan peran UMKM 10. Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY melalui Peningkatan fasilitas, pelayanan, daya tarik destinasi dan industri wisata melalui peningkatan promosi pariwisata 11. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 12. Perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>dan layanan pendukung tingkat internasional yang terintegrasi di kawasan DTW prioritas</p> <p>8. Kerjasama dan kemitraan usaha lintas sektor, lintas daerah, maupun lintas kewenangan dalam rangka peningkatan perekonomian</p> <p>9. Mendorong masuknya investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan baru</p> <p>10. Pengendalian pemanfaatan tataguna lahan khususnya pertanian</p> <p>11. Menciptakan wirausaha-wirausaha baru termasuk di sektor pertanian dalam arti luas yang berintegrasi dengan sektor lainnya sesuai dengan potensinya</p> <p>12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha</p>	<p>kerja</p> <p>13. Perlindungan dengan pengaturan sistem pengupahan yang layak</p> <p>14. Mendorong penciptaan dan pengembangan iklim investasi</p> <p>15. Dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi</p> <p>16. Daya tarik bidang pertanian bagi generasi muda</p> <p>17. Tata kelola dan pemanfaatan lahan yang efisien dan efektif, serta memperhitungkan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi dan ekologi</p> <p>18. Pengenalan daya tarik usaha di sektor bahari bagi generasi muda</p> <p>19. Penerapan akses teknologi dan informasi di sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang produktifitas</p> <p>20. Kemitraan dengan nelayan yang lebih maju di daerah penyangga DIY</p> <p>21. Penerapan teknologi baru dan terbarukan</p> <p>22. Pemberian Insentif dan Fasilitasi Pelaku Usaha Parekraf</p>
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan standarisasi	<p>1. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik</p> <p>2. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Daerah		penyelenggaraan pemerintah daerah

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas	1.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	1.068.414.900	1.101.701.200	33.286.300
Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi	1.1.1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	801.220.700	871.220.700	70.000.000
Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.1.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	680.243.700	750.243.700	70.000.000
	1.1.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	120.977.000	120.977.000	0
	1.1.2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	188.981.400	188.981.400	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	188.981.400	188.981.400	0
	1.1.3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	78.212.800	41.499.100	(36.713.700)
	1.1.3.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	37.780.500	37.780.500	0
	1.1.3.2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	40.432.300	3.718.600	(36.713.700)
	1.2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	764.406.900	675.406.900	(89.000.000)
	1.2.1. Sarana Prasarana Keistimewaan urusan Budaya	550.000.000	461.000.000	(89.000.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	550.000.000	461.000.000	(89.000.000)
	1.2.2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	214.406.900	214.406.900	0
	1.2.2.1. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	214.406.900	214.406.900	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		1.832.821.800	1777.108.100	(55.713.700)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda DIY Tahun 2023

Tabel II.4 Struktur Program dan kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	418.366.000	413.168.000	(5.198.000)
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.326.100	18.326.100	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.429.000	10.429.000	0
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.732.000	2.732.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.165.100	5.165.000	0
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.314.100	39.314.100	0
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0

2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000	32.760.000	0
2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.500	2.500.500	0
2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.053.600	4.053.600	0
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	0
3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	0
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.710.700	183.512.700	(5.198.000)
4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.332.500	2.332.500	0
4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.722.500	21.722.500	0
4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.443.300	7.433.300	0
4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.278.000	23.278.000	0
4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.400	8.750.400	0
4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.184.000	95.986.000	(5.198.000)
4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.000.000	24.000.000	0
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.850.200	39.850.200	0
5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0

5.2. Pengadaan Mebel	0	0	0
5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.850.200	39.850.200	0
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.800.000	6.800.000	0
6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	3.200.000	0
6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	3.600.000	0
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.764.900	115.764.900	0
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.552.900	25.552.900	0
7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.345.000	71.345.000	0
7.3. Pemeliharaan Mebel	0	0	0
7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.987.000	13.987.000	0
7.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	0
Total Anggaran Pendukung	418.366.000	413.168.000	(5.198.000)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda DIY Tahun 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan

Sumber Daya Alam Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan sector unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	BB	Triwulan I	BB
					Triwulan II	BB
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	BB*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp 1.068.414.900
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 764.406.900
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 418.366.000
	Jumlah Anggaran	Rp 2.251.187.800

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reuiu dilakukan karena

adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan sector unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	BB	Triwulan I	BB
					Triwulan II	BB
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	BB*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

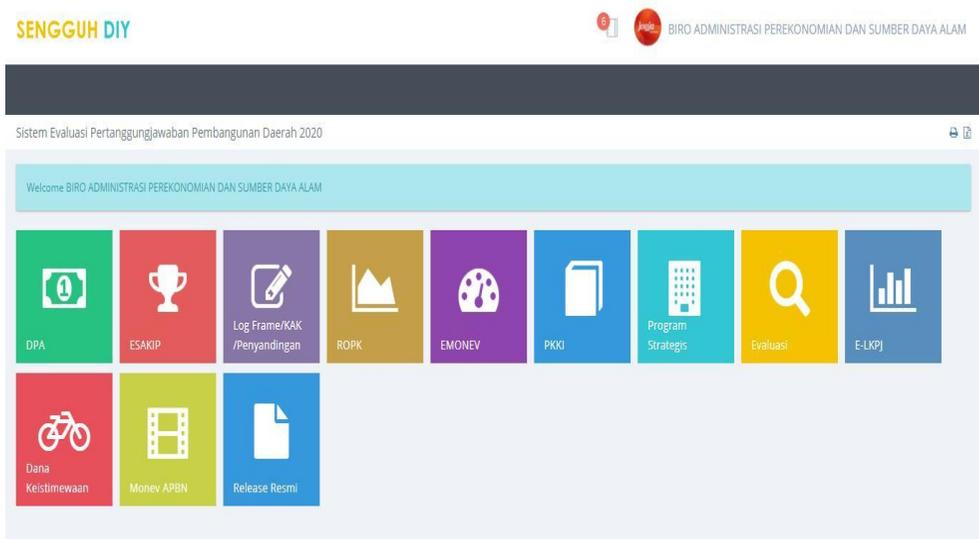
No.	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp 1.101.701.200
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp 675.406.900
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 413.168.000
	Jumlah Anggaran	Rp 2.190.276.100

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring, dan Evaluasi E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel XIII.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	<u>Indikator:</u> persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	105	100	100	100	100	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru								
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD <u>Meta Indikator:</u> <u>Hasil Evaluasi RB</u>	Kategori	n/a	n/a	BB	A	-	-	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran: Meningkatkan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam diukur dengan persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru perencanaan tahun n+1

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
		Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru	rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru pada tahun 2023 ditetapkan 5 (lima) dokumen yaitu :

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,
2. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,
3. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,
4. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan
5. Rekomendasi *green economic*

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
1.	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	<p>a. Nota Dinas Nomor 500/5074 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (Rakorda TPID DIY).</p> <p>b. Nota Dinas Nomor 500/5618 tentang Laporan Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (HLM TPID DIY).</p> <p>c. Surat Edaran Nomor: 7/SE/X/2023 tentang Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.</p> <p>d. Nota Dinas Nomor 500/4901 tentang</p>

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			<p>Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan III Tahun 2023.</p> <p>e. Nota Dinas Nomor 027/3824 tentang Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Semester 1 Permerintah Daerah DIY.</p> <p>f. Nota Dinas Nomor 529/4585 perihal Laporan Koordinasi Pemanfaatan Lahan Pangkalan TNI AU Adisutjipto untuk Mendukung Ketahanan Pangan.</p> <p>g. Nota Dinas Nomor 500/4540 perihal Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi TPID DIY.</p> <p>h. Nota Dinas Nomor 500/1297 tentang Laporan Hasil High Level Meeting (HLM) TPID DIY.</p>
2.	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,	<p>a. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8644 perihal Optimalisasi Program KEJAR</p> <p>b. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk Kewirausahaan 2023-2032</p> <p>c. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027.</p> <p>d. Nota Dinas Nomor 581/4665 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Rakor Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023.</p> <p>e. Nota Dinas Nomor 539/5120 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi BUMD "Evaluasi dan Penilaian Kinerja BUMD".</p> <p>f. Nota Dinas Nomor 500/6055 Laporan Hasil FGD Penguatan Sinergi Program Industri Halal, Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dan Daerah.</p> <p>g. Nota Dinas Nomor 900/3831 tentang Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY Triwulan II dan III.</p> <p>h. Nota Dinas Nomor 900/2130 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital TPAKD DIY Tahun</p>

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			<p>2023.</p> <p>i. Nota Dinas Nomor 900/2193 tentang Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY Triwulan 1.</p> <p>j. Penghargaan sebagai Finalis Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi dari OJK.</p>
3.	Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	<p>a. Nota Dinas Nomor 050/6047 tentang Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi serta Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2023.</p> <p>b. Nota Dinas Nomor 556/5572 tentang Laporan dan Rekomendasi Bahan Kebijakan Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Rencana Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah ke Kementerian PPN/ BAPPENAS RI.</p> <p>c. Nota Dinas Nomor 430/5116 tentang Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023.</p> <p>d. Nota Dinas Nomor 556/4590 tentang Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Pedoman/Acuan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.</p> <p>e. Nota Dinas Nomor 556/4492 tentang Tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester 1 Tahun 2023.</p> <p>f. Surat Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/KEP/2023 tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas</p>

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			<p>Pembangunn Tahun 2023.</p> <p>g. Nota Dinas nomor 050/558 tentang Penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja & Efektivitas Tim Project Management Unit (PMU) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY.</p> <p>h. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 24/SEKDA/III/2023 tentang Penetapan Mekanisme dan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.</p>
4.	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	<p>a. Surat Edaran Gubernur Nomor 510/13896 tentang Pengendalian Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies Lainnya di DIY.</p> <p>b. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16118 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Pemda DIY.</p> <p>c. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16119 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Kabupaten/Kota di DIY.</p> <p>d. Nota Dinas Nomor 031/5950 tentang 1. Rancang Bangun atas Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.</p> <p>e. Nota Dinas Nomor 541/4234 tentang Verifikasi dan Rekomendasi Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.</p> <p>f. Nota Dinas Nomor 528/184 tentang Laporan Pengembangan Usaha Garam di DIY</p>
5.	Rekomendasi green economic	Rekomendasi green economic	<p>a. Surat Edaran Gunernur Nomor 520/6143 tentang Dukungan Kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023</p>

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Nota Dinas Nomor 520/5896 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 2023 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau. c. Nota Dinas Nomor 019/5239 tentang Hasil Koordinasi dan Penerimaan Audiensi Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Terkait Isu Perdagangan Daging Anjing di DIY. d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Menggunakan Kartu Tani.
6.		Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Nomor 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan Dalam Rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY. b. Surat Nomor 500/6919 perihal Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan pada Tahun 2024. c. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras ASN, Nomor: 500/6036. d. Nota Dinas Nomor 900/3415 perihal Laporan Hasil FGD Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Program dan Anggaran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) e. Nota Dinas Nomor 900/3817 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Video Kreatif Akses Keuangan Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2023. f. Nota Dinas Nomor 556/5302 tentang Hasil Koordinasi Tindak Lanjut terkait Partisipasi Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) Tahun 2023 serta Rekomendasi Bahan Kebijakan pengembangan Kepariwisata DIY.

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			<p>g. Nota Dinas Nomor 193/5829 tentang Bahan Masukan untuk Audiensi Duta Besar Swiss untuk Indonesia kepada Gubernur DIY.</p> <p>h. Nota Dinas Nomor 193/5362 tentang Bahan Masukan untuk Audiensi Duta Besar Inggris untuk Indonesia kepada Gubernur DIY.</p> <p>i. Telaah Staf Nomor 556/5516 tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Aksi Afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>j. Nota Dinas Nomor 430/5768 tentang Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Pengusulan dan Seleksi Kalurahan Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 dan Permohonan Kesiediaan Memimpin Rapat Koordinasi dengan 4 (Empat) Pilar untuk Pembahasan Mekanisme dan Prasyarat Kalurahan Peserta Seleksi Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024.</p> <p>k. Nota Dinas Nomor 500/4587 tentang Hasil Koordinasi terkait Keberlanjutan Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk Tahun 2024 dan 2025-2029.</p> <p>l. Nota Dinas Nomor 193/4515 tentang Hasil Koordinasi Tindaklanjut Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi Pemda DIY ke Brussel dan Keikutsertaan/Parsipasi DIY pada Indonesia Expo 2024 di Riyadh.</p> <p>m. Nota Dinas Nomor 520/4050 tentang Permohonan Fasilitasi Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemda DIY dengan PT. BRI (Persero Tbk) tentang Kartu Tani untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi.</p>

No.	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2023	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			n. Surat Nomor 541/08292 perihal Verifikasi dan Rekomendasi Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. o. Balasan Surat Permohonan Rekomendasi Pemasukan (impor) Bibit Kambing Perah Jenis Saanen dari Belanda dan Semen Beku dari Kanda Koperasi PPKDY. p. Fasilitas Pembangunan Usaha Garam Pesisir DIY.

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2023 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru	100	100	100 (5/5x100)	100 (100/100x100)	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terpenuhi).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, tidak terdapat kenaikan/penurunan realisasi.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Pertumbuhan Wirausaha Baru tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.6 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5
Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2	100%	100%
	1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	100%	100%
	1.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 dokumen	4 dokumen

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
	1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	3 dokumen	3 dokumen
	2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	100%
	2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 dokumen	3 dokumen
	3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	100%	100%
	3.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	1 dokumen
	3.2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen	1 dokumen
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
	1. Sarana Prasarana Keistimewaan urusan Budaya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	100%	100%
	1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	1 unit	1 unit
	2. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	100%	100%
	2.1. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	25 Desa	25 Desa

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY berupaya untuk menjaga stabilitas harga terutama bahan pangan pokok strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, TPID DIY melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok serta menyusun kebijakan pengendalian harga yang berpengaruh pada perkembangan inflasi. Selain itu, TPID DIY juga melakukan kegiatan koordinasi dan pemantauan untuk mendapatkan informasi terkait. Pada tahun 2023 TPID DIY telah menyusun program unggulan yang sejalan dengan *roadmap* pengendalian inflasi untuk jangka waktu 2012-2024. Secara umum pengendalian inflasi yang dilakukan TPID DIY tetap mengacu pada prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)

Setelah dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022) TPID DIY selalu masuk dalam kategori 'Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali', pada tahun 2023 dengan inflasi yang termasuk tertinggi nasional tidak masuk dalam nominasi. Meskipun demikian, berbagai upaya pada tahun 2023 sudah dilakukan dan dapat menurunkan nilai inflasi DIY kembali ke rentang sasaran nasional. Hal ini menandakan bahwa sesuai evaluasi Pemerintah Pusat, program-program pengendalian inflasi di DIY dapat memberikan dampak baik bagi stabilitas perekonomian dan inflasi di daerah.

Gambar III.1 Rapat Koordinasi Daerah TPID DIY



Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Selain menjaga stabilisasi harga, TPID DIY saat ini juga menitikberatkan pada menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan sehingga menginisiasi tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, diharapkan antara lain:

- a. Menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan
- b. Meningkatkan produktifitas dan kestabilan harga komoditi pangan
- c. Memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen
- d. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat berkaitan dengan produktifitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen system peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Dalam rangka menjaga kestabilan inflasi dan pertumbuhan ekonomi DIY, Pemda DIY membuat Komitmen Bersama dengan Kabupaten/Kota perlunya upaya bersama dalam rangka meningkatkan produksi, kelembagaan serta efisiensi pemasaran produk pertanian sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi DIY, diantaranya: Menyukseskan reformasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari sisi hulu hingga hilir, Meningkatkan serapan produksi pertanian lokal melalui penguatan kerjasama antar daerah intraprovinsi dalam rangka pemenuhan pasokan komoditas pangan utama bagi masyarakat di DIY, Mengupayakan

sinergi antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah serta ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor di luar dan dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2023 antara lain 1) Program Unggulan Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital di Pesisir Pantai Selatan Gunungkidul (Pantai Gesing, Ngrenean, Drini, dan Siung) dengan hasil Jaringan nirkabel telah terpasang di Pantai Gesing dan Drini, dan Pelatihan dan pendampingan UMKM telah dilaksanakan bagi masyarakat dan sekolah dalam cakupan kecamatan objek program antara lain pelatihan dan sertifikasi navigasi kapal, pelatihan pengolahan produk makanan berbahan baku ikan, pendaftaran NIB dan Sibakul Jogja, pelatihan pengolahan rumput laut dan pendampingan sertifikasi halal, 2) Program Tematik Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung & Wirausaha (Lilah Dana dan Usaha), 3) Program Tematik Program KURjogja Mode Pembiayaan Pengembangan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM DIY (KURjogja Motor UMKM DIY), 4) Program tematik Program K/PMR Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah "PEDE" DIY, 5) Program Tematik Program Pengembangan Ekosistem Ekonomi Inklusif di Wilayah Pedesaan, dan 6) Program Pemberdayaan Usaha Perempuan Go Digital.

Gambar III.2 Kegiatan TPAKD DIY Implementasi KEJAR



Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Gambar III.3 Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi



Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM juga dioptimalkan melalui pelaksanaan program KUR. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam optimalisasi penyaluran KUR antara lain koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyaluran KUR, pemeliharaan website KURjogja “kur.jogjaprov.go.id”, sosialisasi dan pendampingan KUR dalam upaya mendukung pengembangan usaha UMKM dan percepatan perluasan akses keuangan di DIY.

Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang dihasilkan antara lain:

1. Surat Edaran Nomor: 7/SE/X/2023 tentang Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
2. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8644 perihal Optimalisasi Program KEJAR.
3. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk Kewirausahaan 2023-2032.
4. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027.
5. Nota Dinas Nomor 500/5074 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (Rakorda TPID DIY).

6. Nota Dinas Nomor 500/5618 tentang Laporan Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY (HLM TPID DIY).
7. Nota Dinas Nomor 500/4540 perihal Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi TPID DIY.
8. Nota Dinas Nomor 581/4665 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Rakor Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023.
9. Nota Dinas Nomor 539/5120 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi BUMD "Evaluasi dan Penilaian Kinerja BUMD".
10. Nota Dinas Nomor 500/6055 Laporan Hasil FGD Penguatan Sinergi Program Industri Halal, Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dan Daerah.
11. Nota Dinas Nomor 500/6055 tentang Laporan Hasil FGD Penguatan Sinergi Program Industri Halal, Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional dan Daerah.
12. Nota Dinas Nomor 900/3817 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Video Kreatif Akses Keuangan Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2023.
13. Nota Dinas Nomor 900/2130 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital TPAKD DIY Tahun 2023.
14. Penghargaan sebagai Finalis Kategori Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi dari OJK.
15. Berita Acara Nomor 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan Dalam Rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY.
16. Surat Nomor 500/6919 perihal Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan pada Tahun 2024.
17. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras ASN, Nomor: 500/6036.

b. Capaian Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Menindaklanjuti program Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
- b. pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; dan
- c. monitoring dan evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya.

Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 - 2027. Desa Mandiri Budaya digadang-gadang menjadi embrio dari lahirnya sebuah desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perekonomian. Pada tahun 2023 ditargetkan tercapai sebanyak 30 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

Dalam rangka mencapai target capaian kinerja program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, maka telah ditetapkan 10 (sepuluh) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020. Pada tahun 2021 ditetapkan 8 (delapan) Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 ditetapkan 7 (tujuh) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022.

Pada tahun 2023 akan dilakukan penetapan kembali dengan target terbentuk total 30 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Akan tetapi dikarenakan masih memungkinkan untuk membentuk 7 (tujuh) Desa/Kalurahan, maka pada tahun 2023 akan ditetapkan 7 (tujuh) Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Dalam upaya mewujudkan sistem penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya yang mengutamakan akuntabilitas dan kredibilitas, maka pada tahun 2022 Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri yang terbentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 28/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun Anggaran 2022 telah menyusun kriteria dan mekanisme penilaian sebagai dasar pemberian peringkat Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya. Melalui sistem ini Desa/ Kalurahan diwakili perangkat desa dapat melakukan penilaian secara mandiri/ self assesment yang kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim. Adapun pada tahun 2023 Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 166/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring

Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun Anggaran 2023 melanjutkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan pada kriteria dan mekanisme penilaian yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 24/SEKDA/III/2023 tentang Penetapan Mekanisme dan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Di samping dalam rangka pencapaian tujuan teknokratik berupa target-target capaian dalam RPJMD DIY bisa terpenuhi, target lain yang perlu dicapai oleh Pemda DIY adalah pencapaian tujuan substantif yaitu dampak ke masyarakat berupa peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran serta perlu adanya pemantauan terkait ketercapain visi misi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Pentingnya kesejahteraan dan ketenteraman warga maka pemerintah DIY menganggap *urgent* mendorong tumbuhnya 32 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY yang terbentuk hingga pada tahun 2023. Harapannya dengan kemunculan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tersebut, masyarakat bisa secara otonom mengembangkan potensi dan kekayaan desanya untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan warga.

Pada tahun 2023, pelaksanaan pemantauan evaluasi dilaksanakan melalui 5 (lima) metode, yaitu penilaian terhadap paparan perangkat Desa/Kalurahan terkait penyelenggaraan kebijakan, metode dokumentasi, metode penyebaran angket untuk menyaring data dari para *stakeholders* terutama kelompok sasaran, metode wawancara dengan berpedoman pada form instrumen/indikator, serta metode diskusi sebagai penguat monitoring dengan melakukan pertemuan dengan para *stakeholders* yang terlibat. Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim. Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan kelanjutan program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di masing-masing Desa/Kalurahan.

Gambar III.4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 di Kalurahan Bejiharjo



Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Dalam rangka memenuhi keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, melalui dorongan terhadap pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, maka Pemerintah Daerah DIY berupaya melakukan langkah-langkah strategis. Upaya percepatan dari program-program prioritas dan strategis perlu dilakukan agar semua program bisa berjalan, dan bisa berfungsi pada waktu yang diharapkan. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diperlukan strategi, kebijakan, inovasi, koordinasi dan sinergi. Dukungan Pemda DIY salah satunya melalui tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (TP5) DIY, dimana dalam upaya operasionalnya TP5 ini didukung *Project Management Unit* (PMU) yang terdiri dari 6 (enam) orang professional yang memiliki pengalaman dan keahlian di sektor terkait Program Prioritas yang telah ditetapkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari daerah di Indonesia yang memiliki potensi kreatif yang tinggi karena memiliki sumber daya manusia kreatif dengan produk usaha yang cukup menopang ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih cukup besarnya jumlah pelaku ekonomi usia muda yang sangat produktif dan memiliki banyak ide kreatif. Dalam upaya

kolaborasi membangun keunggulan daerah terkait ekonomi kreatif, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah yang salah satunya berkaitan dengan pengembangan Kawasan Berbasis Kemitraan (*People-Public-Private-Partnership*).

Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang dihasilkan antara lain:

1. Surat Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/KEP/2023 tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023.
2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 24/SEKDA/III/2023 tentang Penetapan Mekanisme dan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
3. Nota Dinas Nomor 556/5302 tentang Hasil Koordinasi Tindak Lanjut terkait Partisipasi Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) Tahun 2023 serta Rekomendasi Bahan Kebijakan pengembangan Kepariwisata DIY.
4. Nota Dinas Nomor 050/6047 tentang Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi serta Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2023.
5. Nota Dinas Nomor 556/4492 tentang Tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester 1 Tahun 2023.
6. Nota Dinas Nomor 193/4515 tentang Hasil Koordinasi Tindaklanjut Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi Pemda DIY ke Brussel dan Keikutsertaan/Parsisipasi DIY pada Indonesia Expo 2024 di Riyadh.
7. Nota Dinas Nomor 556/5572 tentang Laporan dan Rekomendasi Bahan Kebijakan Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Rencana Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah ke Kementerian PPN/ BAPPENAS RI.
8. Nota Dinas Nomor 430/5768 tentang Laporan Hasil Koordinasi Persiapan Pengusulan dan Seleksi Kalurahan Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 dan Permohonan Kesediaan Memimpin Rapat Koordinasi dengan 4 (Empat) Pilar untuk Pembahasan Mekanisme dan Prasyarat Kalurahan Peserta Seleksi Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024.

9. Nota Dinas Nomor 430/3075 tentang Rekomendasi Usulan Kandidat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023.
10. Nota Dinas Nomor 430/5116 tentang Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023.
11. Nota Dinas Nomor 556/4590 tentang Hasil Koordinasi dan Konsultasi terkait Pedoman/Acuan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

c. Capaian Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Pertumbuhan ekonomi hijau dan perlindungan sumber daya alam adalah suatu pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan secara serentak sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih dekat dengan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Hal ini dirancang untuk mewujudkan peningkatan PDRB dan standar hidup yang berkelanjutan dan terdistribusi secara adil, sementara pada saat yang sama, membatasi polusi, membangun infrastruktur yang bersih dan tangguh, menggunakan sumberdaya dengan lebih efisien, dan menilai aset alam yang sering tidak dihitung nilai ekonominya meskipun telah mendukung keberhasilan ekonomi selama berabad-abad yang akhirnya menentukan kesejahteraan manusia.

Jika pertumbuhan ekonomi Yogyakarta ke depan tidak ramah lingkungan, pertumbuhan ekonomi seperti ini pada akhirnya akan mengurangi kemakmuran di masa depan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau terpusat pada kualitas pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kemakmuran ekonomi dengan memberikan dampak sosial yang lebih baik dan mengurangi tekanan pada lingkungan dan modal alam. Perlindungan sumber daya alam juga dapat mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan maritim. Meskipun akan ada biaya dalam proses transisi menuju pertumbuhan ekonomi hijau, setidaknya dalam jangka pendek, secara keseluruhan biaya ini akan diimbangi bahkan dilampaui oleh manfaat yang akan diperoleh. Dengan demikian, trade-off antara kelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi tidak harus terjadi. Secara keseluruhan, upaya menghijaukan pertumbuhan ekonomi tidak perlu menghambat penciptaan kemakmuran atau pekerjaan; pada kenyataannya, penghijauan tersebut berarti kemajuan di berbagai tujuan sosial, termasuk pertumbuhan yang lebih inklusif.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung tujuan besar diatas antara lain adalah :

- a. Kajian Grand Design Sumber Daya Alam;
- b. Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau; dan
- c. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam

Disamping ketugasan sesuai tugas dan fungsi yang melekat, terdapat pula ketugasan sebagai koordinator penetapan usulan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan se Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mencapai target kinerja sesuai ketugasan serta mewujudkan perlindungan terhadap sumber daya perekonomian di DIY, disusun beberapa rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yaitu:

1. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16118 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Pemda DIY.
2. Surat Edaran Gubernur Nomor 541/16119 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) pada OPD Lingkup Kabupaten/Kota di DIY.
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 520/6143 tentang Dukungan Kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023.
4. Surat Edaran Gubernur Nomor 510/13896 tentang Pengendalian Peredaran/Perdagangan Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies Lainnya di DIY.
5. Nota Dinas Nomor 019/5239 tentang Hasil Koordinasi dan Penerimaan Audiensi Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Terkait Isu Perdagangan Daging Anjing di DIY.
6. Nota Dinas Nomor 520/5896 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 2023 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau.
7. Nota Dinas Nomor 031/5950 tentang 1. Rancang Bangun atas Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
8. Nota Dinas Nomor 528/184 tentang Laporan Pengembangan Usaha Garam di DIY.

9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah DIY dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Menggunakan Kartu Tani.

Dalam perspektif pembangunan nasional, pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam menjadi tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat, dengan semangat ini proses pembangunan tidak cukup hanya didasarkan pada politik, hukum dan demokrasi, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara konseptual pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal terpenting dalam pembangunan nasional yang telah digariskan di dalam kebijakan nasional yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam lingkup daerah/provinsi, tidak ada satu daerah pun yang dapat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan yang terpisah secara mandiri. Sebaliknya, daerah perlu mengakui saling ketergantungan yang tak terbantahkan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan keberlanjutan/kelestarian lingkungan hidup. Para pemimpin di daerah harus mengambil tindakan di seluruh aspek keputusan kebijakan, perencanaan dan investasi dan selanjutnya maka langkah ke depan untuk daerah dan masyarakat meliputi individu masyarakat, komunitas, investor, dan perusahaan dalam hal ini haruslah terpadu, menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, berdasarkan strategi yang secara bersamaan mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan, inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi serta permasalahan pembangunan lainnya.

Sebagai dukungan terhadap komitmen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, disusunlah Dokumen Kajian Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan maksud untuk mereview tata kelola sumber daya alam yang ada di DIY. Selain itu, disusun juga landasan konseptual mengenai pengelolaan SDA di DIY yang berkelanjutan. Dalam menyusun konsep tersebut, telah dibentuk dalam sebuah rancang bangun roadmap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di DIY. Diharapkan dengan adanya kajian tersebut, seluruh stakeholder pengampu tata kelola

sumber daya alam di DIY dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Gambar III.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 di Kalurahan Bejiharjo



Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, terdapat konsep ekonomi hijau yang merupakan pendekatan ekonomi yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan alam, sambil tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari ekonomi hijau adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang rama lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau disusun dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kerangka ekonomi hijau demi mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, dengan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kerangka implementasi ekonomi hijau, diharapkan dapat menentukan arah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun hasil rekomendasi yang didapatkan yang terpenting adalah adanya implementasi ekonomi hijau pada sektor-sektor utama di DIY dan juga sektor yang rentan atau bahkan merusak lingkungan. Selain itu, sangat dibutuhkan komitmen pemerintah di semua tingkatan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif, penguatan kapasitas, praktik terbaik, panduan, dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, dan peluang pendanaan untuk bisnis hijau. Terakhir, perlu ada tindakan berupa mengubah arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan aktivitas ekonomi yang rendah karbon.

Dalam mendukung implementasi ekonomi hijau, diperlukan juga adanya perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal tersebut didasari karena sebagian besar teori ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi makro mengabaikan masalah-masalah lingkungan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk maka makin besar tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya yang digunakannya. Pada awalnya memang tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya alam sebagai hasil kegiatan ekonomi kurang diperhatikan karena masih dianggap relatif kecil pengaruhnya sehingga tidak diperhitungkan kelestarian dan perbaikannya. Namun, pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana agar terhindar dari pengurasan karena kekayaan alam yang ada juga merupakan hak generasi selanjutnya.

Gambar III.6 Panen Padi Aplikasi Biosaka





Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Maksud dari disusunnya rekomendasi kebijakan perlindungan sumber daya alam adalah untuk memberikan suatu wacana arah kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di DIY dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Serta dengan tujuan tersusunnya konsep pembangunan berkelanjutan supaya menjadi sebuah rencana nyata pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rekomendasi diberikan sesuai dengan pengembangan konsep pengelolaan SDA daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah itu sendiri. Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah konsep pengelolaan SDA secara terpadu. Hal tersebut karena implikasinya yang sangat luas, disamping guntut kepentingan membuat berbagai kebijakan, juga yang terutama adalah bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional/daerah. Selain itu, dalam rangka penerapan suatu konsep pengelolaan SDA diperlukan penelitian/pengkajian awal yang matang.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Kerja sama yang baik dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program kegiatan lintas sektor dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- b. Komitmen dari para stakeholder terkait pembangunan dan pengembangan perekonomian di DIY.
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi program dan kegiatan secara berkala baik melalui rapat-rapat rutin bulanan secara offline (tatap muka) ataupun online (zoom meeting dan atau dengan media komunikasi lain).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pergantian personil pada OPD terkait sehingga perlu adanya pengulangan dalam pembahasan materi pada pertemuan rutin yang diselenggarakan.
- b. Belum terintegrasinya sistem informasi harga pangan DIY dan Kabupaten/Kota.
- c. Keterbatasan pemerintah kalurahan dalam pengarsipan dokumentasi kegiatan baik notulen, laporan, maupun foto/video sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam proses verifikasi data monitoring dan evaluasi DMB.

3.1.2 Sasaran: meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO.	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi OPD

Kinerja sasaran meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	n/a	BB	A	-	A	-

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatkan Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- a. Reformasi Birokrasi dengan target kategori BB realisasi mendapatkan kategori A, dengan demikian capaian realisasi melebihi target yang ditetapkan.
- b. Target pada akhir RPD tahun 2026 kategori A

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori Reformasi Birokrasi OPD tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel .III.11 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,50	96,15
	3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
	3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen
	3.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen
	3.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan
	4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
		Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	4.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	4.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
	4.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan
	5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%
	5.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%
	6.1. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 paket	1 paket

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan		
	6.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	21 paket
	6.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	15 paket
	6.4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket
	6.5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen
	6.6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan
	6.7.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	100%
	7.1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit
	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
	8.1.Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	1 laporan	1 laporan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
	Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat		
	8.2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%
	9.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit
	9.2.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit
	9.3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit
	9.4.Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin	32 unit	32 unit

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
	Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		

Capaian kinerja Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah tahun 2023 dengan indikator Reformasi Birokrasi OPD terealisasi melebihi target, target pada tahun 2023 kategori BB realisasi kategori A, keberhasilan capaian Indikator tersebut didukung dari:

- a. Sebagai koordinator RB Tematik pengendalian inflasi
- b. Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis Biro APSDA dengan skor 92,59 (sangat memuaskan)
- c. Peringkat 1 dengan skor 923.33 Hasil Penilaian Kinerja Instansi Triwulan III dari BKD
- d. Menjadi Koordinator Dimensi Smart Ekonomi sesuai SK Gubernur DIY No 61/TIM/2023 tentang Kelompok Kerja Smart Province DIY
- e. Pelaksanaan forum konsultasi publik
- f. Pembuatan SK Kepala Biro nomor 878/40 tanggal 3 Januari 2023 tentang pembentukan tim unit pengelola pengaduan (UPP) pada Biro APSDA
- g. Pembuatan SK Kepala Biro nomor 878/41 tanggal 3 Januari 2023 tentang pembentukan tim dan prosedur penanganan benturan kepentingan pada Biro APSDA
- h. Pembuatan SK Kepala Biro nomor 700/42 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Biro APSDA.
- i. Pembuatan SK Kepala Biro nomor 700/1067 tanggal 1 Maret 2023 tentang daftar identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian risiko serta penilaian risiko kecurangan/fraud risk assesment di lingkungan Biro APSDA
- j. Telah melakukan Perkembangan Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) dan Pelaksanaan Atas Respon Terhadap Risiko Kecurangan setiap triwulan
- k. Telah melengkapi Self Assessment Quistionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik
- l. Telah melaksanakan tugas sebagai evaluator Reformasi Birokrasi Tematik
- m. Penataan Sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi pendidikan
- n. Peningkatan SDM dengan mengikuti berbagai diklat/bimtek yang diadakan oleh Pemda DIY ataupun dengan Kementrian

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar OPD DIY
- b. Terlaksananya koordinasi yang solid di lingkup internal Biro APSDA
- c. Ketersediaan anggaran dan penunjang lainnya dalam mendukung ketercapaian target sasaran

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021

Ketugasan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dalam mendukung Program Prioritas Pemda sebagaimana dalam Keputusan Gubernur DIY No 353/KEP/2021 adalah sebagai Sekretariat TP5 DIY dengan ketugasan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
2. Menyiapkan data dan informasi;
3. Memfasilitasi pelaksanaan rapat, rapat koordinasi, dan konsultasi; dan
4. Menyiapkan laporan tahunan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan

b. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.12 Kontribusi Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,34%	4,96%	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	100%	100%
		2. Tingkat Pengan	3,42	3,69				

		<p>3. Indeks Terbuk a</p> <p>3. Indeks Gini</p> <p>4. Indeks Williamson</p> <p>5. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)</p>	0,423	0,449	n dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru		
2.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1.Opini BPK 2.Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	WTP AA	*) WTP AA	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	BB	A

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam memiliki peran dalam menghasilkan/mengeluarkan bahan kebijakan yang dapat menjadi daya ungkit nilai/indeks Sasaran Pemerintah Daerah. Diantaranya adalah dengan mengeluarkan/bahan kebijakan yang mendukung terhadap sasaran Pemerintah Daerah.

Sasaran Pemda yang didukung oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan tercapainya target kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA diharapkan mampu ikut andil

dalam mendukung realisasi target sasaran Pemerintah Daerah, karena target-target sasaran Pemerintah Daerah harus secara gotong royong dan lintas sektor didukung oleh seluruh Perangkat Daerah.

Tabel III.13 Kontribusi Program Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Minimum (%)	2,9%	5,13%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2	100%	100%	100%
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian	100%	100%	100%

2	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan	3,60%	3,13%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2	100%	100%	100%
					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian	100%	100%	100%

Program Perekonomian dan Pembangunan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan merupakan dua program pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA yang mendukung Program Pemerintah Daerah yaitu Program Pengembangan Sektor Unggulan dan Program Penumbuhan Wirausaha Baru. Pada tahun 2023 untuk mendukung Program Pemerintah Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan SDA mengeluarkan kebijakan diantaranya berupa SK Gubernur tentang Penetapan Desa Mandiri Budaya, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Kewirausahaan 2023-2032,

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027 nota dinas tentang Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Semester 1 dan Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia (ABBWI).

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	100	100	100%	1.777.108.100	1.771.383.900	99,67	5.724.200
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	BB	A	-	413.168.000	403.391.288	97,63	9.776.712
Jumlah						2.190.276.100	2.174.775.188	99,29	
Total Belanja Operasional						2.190.276.100	2.174.775.188	99,29	

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Th 2023, Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Th 2023

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA memenuhi target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 2.190.276.100,- terealisasi Rp. 2.174.775.188,- atau 99,29% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 15.500.912,- atau 0,71% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honorarium

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

- a. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, sehubungan dengan perlunya upaya bersama dalam rangka meningkatkan produksi, kelembagaan serta efisiensi pemasaran produk pertanian sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka kami berkomitmen untuk: 1. Menyukseskan reformasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari sisi hulu hingga hilir antara lain dengan: a. Mendorong optimalisasi tanah kas desa di kabupaten untuk mendukung pertanian dan mendukung desa mandiri pangan; dan b. Mendorong akselerasi regenerasi pekerja pertanian pada tingkat kalurahan/kelurahan. 2. Meningkatkan serapan produksi pertanian lokal melalui penguatan kerja sama antar daerah intraprovinci dalam rangka pemenuhan pasokan komoditas pangan utama bagi masyarakat di DIY. 3. Mengupayakan sinergi antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah serta ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.
- b. Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat

Daerah, Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam melakukan pengembangan kewirausahaan daerah yang ditetapkan untuk periode tahun 2023-2027. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah diselenggarakan secara bersinergi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. program; b. kegiatan; c. sasaran; d. indikator; e. target; Saat ini rapergub telah memasuki tahap harmonisasi di Kemenkumham.

- c. Mekanisme Penetapan dan Seleksi Bakal Calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023. Sebagai bagian dari mewujudkan sistem penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mengutamakan akuntabilitas dan kredibilitas, perlu adanya mekanisme dan kriteria penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagai dasar pemberian peringkat pada desa/kalurahan untuk kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Mekanisme dan Kriteria Penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya berfungsi sebagai pedoman bagi Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan, maupun bagi perangkat desa serta pihak-pihak terkait dalam upaya pemenuhan kriteria. Tujuannya agar desa/kalurahan yang akan menjadi calon Desa/Kalurahan Mandiri Budaya lebih siap dalam merancang dan mempersiapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya karena adanya seleksi awal berupa paparan rancangan program/kegiatan desa/kalurahan dalam 3 tahun ke depan dan adanya pernyataan komitmen dari desa/kalurahan.
- d. Perbaikan Instrumen Penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 Untuk Mendukung Target Kinerja Pemda DIY, untuk terlaksananya penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang akuntabel dan kredibel, perlu adanya penyempurnaan dalam penetapan mekanisme dan penyusunan kriteria penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, sebagai dasar pemberian peringkat pada desa/kalurahan. Berkaitan dengan adanya RPJMD yang baru tahun 2023-2027, maka instrument di dalam penilaian DMB nantinya perlu disesuaikan agar dapat mendukung pencapaian target kinerja Pemda DIY, diantaranya dengan memasukkan unsur penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, intoleransi, KDRT, dan lain-lain. Hal ini dalam rangka mencapai

kebermanfaatn rencana kebijakan dan program kegiatan Desa Mandiri Budaya dalam hal terkait: a)Penurunan angka kemiskinan; b)Penurunan angka pengangguran; c)Pemberdayaan aparatur/perangkat kalurahan; d)Pemberdayaan masyarakat dari aspek budaya, ekonomi/kewirausahaan, kepariwisataan, kelembagaan, sosial, gender, dan disabilitas; e)Keterlibatan masyarakat, peran tokoh lokal dalam pengembangan dan penyelenggaraan DMB; f)Pelestarian nilai lokal baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik; g)mitigasi risiko bencana.

- e. Survey/Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Secara Online, dalam rangka mengetahui Basil seta dampak dari implementasi kebijakan Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB) untuk mewujudkan kjesjahteraan dan peningkatan kualitas Hidup mayarakat melalui pengembangan budaya, potensi wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan dan masyarakat rentan/miskin seta pengembangan kewirausaahaan, maka Pemda DIY melalui Tim Penilaian dan Monitoring Evaluatie Desa/Kalurahan Mandiri Budaya melakukan survey/evaluasi secara online, berdasarkan instrumentalización yang ájelas dan terukur kepada kalurahan yang telah melaksanakan program DMB. Survey implementasi kebijakan program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ini disebarkan kepada sekitar 70 orang dengan target responden dari Lurah, pamong/perangkat kalurahan, dukuh/RT/RW, Bamuskal, LPM Kalurahan, Karang Taruna, Tim PKK Kalurahan, Lembaga Adat Sanggar/Kelompok seni, Pennella Desa Budaya, Pengelola Desa Wisata, Pengelola Desa Prima, Pengelola Desa Preneur, Pelaku UMKM, dan masyarakat umum melalui link survey: bit.ly/SurveyKebijakanDMB2023.
- f. Surat Edaran Gubernur DIY nomor 900/8644 tentang Optimalisasi Program Kejar, Program Satu Rekening Satu Pelajar'KEJAR" menjadirsalah satu Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi program bertujuan membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini di lembaga keuangan formal dan mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital. Surat edaran ini disusun dalam rangka percepatan peningkatan nilai literasi dan inkJusi keuangan di DIY
- g. Pelaksanaan Lomba TPAKD "Kelompok Usaha Wanita Go Digital" dalam rangka memperingati hari kartini 2023, TPAKD DIY mensinergikan kegiatan optimalisasi akses keuangan di daerah melalui moment peringatan Hari Kartini

Tahun 2023, guna mendukung pengembangan UMKM Perempuan Go Digital bersama - sama OJK DIY, BPD DIY, dan TPAKD Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini dilakukan inventarisasi data aktivitas dan transaksi digital ekonomi, sosialisasi akses keuangan digital dan perlindungan konsumen, memfasilitasi akses produk/layanan keuangan dan pemasaran digital, serta memberikan intensif pengembangan usaha.

- h. Rekap Rekomendasi JBT 2023 Kab/Kota DIY, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 500.6.7/4468/Bangda tanggal 9 Maret 2023 perihal Verifikasi dan Rekomendasi Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, sebagai langkah percepatan pelaksanaan PP No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak maka Biro Adm Perekonomian dan SDA Setda DIY memohon kepada OPD Provinsi serta Kab/Kota untuk melaksanakan verifikasi dan penerbitan rekomendasi konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah DIY setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan secara online melalui email : admbagpsdp@gmail.com dan juga Google Spreadsheet : <https://bit.ly/rekaprekomjbt2023>.
- i. Pembaharuan Petunjuk Teknis Implementasi Beras ASN. Pembaharuan Petunjuk Teknis Implementasi Beras ASN dengan mengakomodasi HET yang baru sehingga gapoktan tetap mendapatkan margin keuntungan agar tidak merugi akibat kenaikan harga gabah dan beras di pasaran.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi Refocusing dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro APSDA 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY 3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY 4. TPID Kabupaten/ Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY : Biro APSDA sebagai koordinator dalam pelaksanaan High Level Meeting TPID DIY 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY : Sebagai instansi yang memberikan arahan outlook perekonomian dan perkembangan inflasi DIY ke depan yang dipengaruhi dari sisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Nomor 500/2847 tentang Komitmen Bersama Mendorong Kemandirian Pangan Dalam Rangka Menjaga Kestabilan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi DIY - Nota Dinas Laporan 	Masyarakat DIY (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen)	Bagi Pemerintah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung upaya stabilisasi inflasi di daerah 2. Mendukung pencapaian kinerja program kerja pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, kelancaran

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		5. Perguruan Tinggi	<p>Administered Prices (kebijakan harga yang diatur/ditetapkan pemerintah, seperti BBM, Listrik, tarif angkutan, dll), volatile food (harga pangan yang mengalami gejolak), pengaruh energi dan kondisi perekonomian global. Kemudian, rekomendasi dalam menghadapi HBKN juga menjadi topik diskusi untuk kemudian ditindaklanjuti bersama oleh TPID DIY.</p> <p>3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY : Saling memberikan masukan pada arah pengendalian inflasi di DIY serta upaya-upaya strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi HBKN</p>	High Level Meeting		<p>Distribusi, dan Komunikasi Efektif) pada masing-masing instansi TPID DIY</p> <p>3. Menyelaraskan kesinambungan upaya pengendalian inflasi daerah dengan perencanaan strategis daerah</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja Daerah terkait pengendalian inflasi daerah yang selalu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro APSDA 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY 3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY 4. TPID Kabupaten/ Kota 5. Perguruan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro APSDA sebagai koordinator dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahunan TPID. Biro APSDA berperan dalam mngkompilasi dan menyusun Laporan Kinerja sesuai format yang telah ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY : Sebagai instansi yang memberikan fasilitasi tambahan pada pelaksanaan kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Kinerja TPID DIY untuk mengumpulkan anggota TPID DIY. Bersama Biro APSDA, KPw Bank Indonesia DIY mengkompilasi data, informasi, bukti dokumen dari seluruh anggota TPID DIY untuk kemudian disusun dalam bentuk Laporan Kinerja TPID sesuai format yang telah ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY : Saling memberikan masukan, data, 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Tentang Pengendalian Inflasi Daerah - Laporan Kinerja Tahunan TPID 	Masyarakat DIY (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen)	<p>OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>informasi, bukti dokumen, usulan program yang dituangkan pada Laporan Kinerja Tahunan TPID.</p> <p>4. TPID Kabupaten/Kota : Saling melengkapi kebutuhan data, informasi, bukti dokumen dalam penyusunan Laporan Kinerja TPID</p> <p>5. Perguruan Tinggi : sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan, usulan inovatif program kerja yang akan diunggulkan pada proses penyusunan dan penulisan Laporan Kinerja Tahunan TPID DIY</p>			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
3.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian; Pelaksanaan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	<p>OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 4. Dinas Pariwisata DIY 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 8. Dirjen Perbendaharaan DIY 9. Bank Indonesia – Yogyakarta 10. OJK DIY 	<p>OPD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY berkontribusi dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan TPAKD b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD c. Penyusunan dan penyampaian Laporan Monev TPAKD 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY berkontribusi dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan usaha UMKM b. Penyediaan data UMKM 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkontribusi dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendampingan pembiayaan bagi UMKM b. Penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM 4. Dinas Pariwisata DIY berkontribusi dalam penyediaan data 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Induk Kewirausahaan 2023-2032 2. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023-2027 3. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8644 perihal Optimalisasi Program KEJAR. 4. Laporan Pelaksanaan Program Kerja TPAKD DIY 5. Nota Dinas Nomor 900/2130 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Kelompok Usaha Wanita Go Digital TPAKD DIY Tahun 2023 6. Laporan Pelaksanaan Webinar Peningkatan 	OPD Terkait dan Masyarakat/Pe lajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA 2. Masyarakat (pelaku usaha dan pelajar): <ol style="list-style-type: none"> a. Menambah modal usaha

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>Olahraga DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan sosialisasi SimPel</p> <p>7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berkontribusi dalam penyesuaian spesifikasi website KUR Jogja</p> <p>8. Dunia usaha : Asosiasi UMKM berkontribusi dalam memperluas wawasan dan informasi pasar</p> <p>9. PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR berkontribusi dalam pelaksana teknis dan penyedia data</p>	<p>Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI</p> <p>7. Nota Dinas Nomor 900/3817 tentang Laporan Pelaksanaan Lomba Video Kreatif Akses Keuangan Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2023</p> <p>8. Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi</p>		<p>b. Meningkatkan skill pelaku usaha</p> <p>c. Meningkatkan kualitas produk</p> <p>d. Memperluas jaringan pemasaran</p> <p>e. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan</p>

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
4.	Koordinasi dan evaluasi Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Biro APSDA, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi & UKM, Dinas P3AP2 DIY, Biro Tata Pemerintahan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Paniradya Kaistimewaan 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka penyusunan rekomendasi Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, maka Biro Administrasi berperan melakukan koordinasi pelaksanaan dengan semua stakeholders lintas sektor melalui rapat koordinasi dan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan penilaian ke Kalurahan untuk penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Biro APSDA juga melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya untuk menyusun rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY (Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, DP3AP2, Dinkop UKM DIY, Paniradya Kaistimewan, BAPPEDA DIY, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat) berperan sebagai anggota Tim Penilaian dan Monev 	Rekomendasi kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya	OPD dan masyarakat	<p>Manfaat bagi OPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian salah satu target kinerja Program Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pergub nomor 7 Tahun 2022 tentang RPD DIY Tahun 2023-2026 yang menjadi tanggung jawab Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu indikator kinerja jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kelurahan Budaya, Desa/ Kampung Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima) dengan target 30 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019-2023 Mendukung pencapaian kinerja

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>DMB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi/Akademisi (UGM, UKDW, ISI Yogyakarta dan UMY) serta unsur budayawan/tokoh budaya, berperan sebagai anggota Tim Penilaian dan Monev serta untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan • Pemerintah Kalurahan dan Unsur lembaga di Kalurahan berperan sebagai pelaksana kegiatan/Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 			<p>sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA <p>Manfaat bagi masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kemiskinan • Mengatasi pengangguran • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan investasi

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
5.	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	<ul style="list-style-type: none"> Biro APSDA, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas PTR DIY, DPPM DIY, DPKP DIY, DKP DIY, DLHK DIY, Bappeda DIY, Biro PIWP2 	<ul style="list-style-type: none"> Biro APSDA: koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional di DIY, inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program prioritas, pemantauan terhadap strategi dan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah OPD yang terlibat: Koordinasi dan sinkronisasi OPD yang terlibat secara kontinu 	Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	OPD	Manfaat bagi OPD: <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Mendukung pencapaian kinerja sasaran perumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas Mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan Gubernur DIY Mendorong perkembangan pembangunan infrastruktur di DIY
6.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> Bappeda DIY Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 	<ol style="list-style-type: none"> Biro APSDA sebagai penyusun Roadmap Usaha Garam dan bertugas melakukan koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikasi SNI Garam Konsumsi, sebagai capaian 	<ol style="list-style-type: none"> Kelompok Usaha Garam 	Kelompok Usaha Garam: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan anggota

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
	Sumber Daya Alam (Pemantauan dan Evaluasi Roadmap Usaha Garam DIY)	3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 4. Dinas Koperasi dan UKM DIY 5. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY 6. Dinas Pertanahan dan Tat Ruang 7. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	serta melakukan sinkronisasi antara perangkat daerah terkait 2. Bappeda DIY memberikan kebijakan teknokratis 3. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai focal point dalam pengembangan usaha gram DIY 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan persiapan dan pendampingan pelaksanaan pembuatan rumah produksi garam sebagai pendukung utama produksi garam ber-SNI 5. Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha garam sehingga terbentuk menjadi badan hukum 6. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY melakukan pendampingan pembuatan ijin edar, merk dagang, dan pembuatan SNI 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan rekomendasi lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lokasi tunnel garam dan rumah	roadmap usaha garam tahun 2020-2022 2. Rumah produksi garam Tirta Bahari di Pantai Sepanjang, Kemadang, GK 3. Badan hukum kelompok petani garam Tirta Bahari	2. Perangkat Daerah yang tercantum di dalam Roadmap Usaha Garam	kelompok 2. Mata pencaharian alternative Perangkat daerah: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			produksi garam 8. BBPOM melakukan pendampingan dalam proses pencapaian SNI 9. BBPO bersama dengan Disperindag DIY menyusun layout rumah produksi garam 10. KKP RI memberikan support pengembangan usaha garam dengan memberikan proyek percontohan usaha garam 11. Perguruan Tinggi Memberikan bantuan penelitian ilmiah mengenai kondisi fisik pesisir selatan dalam mendukung pengembangan produksi garam DIY			

BAB IV Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.
2. Didalam pelaksanaan analisis untuk membuat rumusan kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan karena belum memadainya kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, pasar global/pasar bebas, perubahan iklim dan global warming. Meskipun demikian, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.
3. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk ke depannya.
4. Penyerapan atas belanja langsung sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD adalah sebesar 99,29 % dan capaian fisik sebesar 100% serta menghasilkan capaian kinerja OPD sebesar 100% yang diperoleh dari ditindaklanjutinya seluruh bahan kebijakan yang disusun oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menjadi kebijakan pada tahun berikutnya.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat obyektif, oleh sebab itu

penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis

2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra)

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersedianya Bahan Rumusan Kebijakan Strategis dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Melalui Percepatan Berusaha, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Pemerataan	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	100	100	100	100	100
2.	Pembangunan Wilayah menuju Masyarakat Mandiri, Adil, Maju dan Sejahtera	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	BB	BB	A	A	A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirusaha Baru	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	Indeks	BB	Triwulan I	BB
					Triwulan II	BB
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	BB*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Perekonomian Dan Pembangunan (APBD)	Rp. 1.101.701.200
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 675.406.900
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 413.168.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 2.190.276.100

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 8 November 2023


 PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 HAMENKUBUWONO X


 PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
 SETDA DIY,
 YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si
 NIP. 196606041993032007

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Sasaran Program	Program RPD	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- 1.1. Program: Perekonomian dan Pembangunan (APBD) : Rp. 1.101.701.200.
- a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian : Rp. 871.220.700
- a.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro : Rp. 750.243.700
- a.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro : Rp. 120.977.000

- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD : Rp. 41.499.100
- b.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha : Rp. 37.780.500
- b.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah : Rp. 3.718.600
- c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam : Rp. 188.981.400
- c.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan : Rp. 188.981.400

- 2. *)Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
- 3. Selanjutnya Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY akan menyusun Penjabaran Perjanjian Kinerja yang memuat pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didasarkan pada Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Yogyakarta, 8 November 2023



PENJABARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
 Jabatan : Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100
1.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro : 2 dokumen	26,7		
			Rekomendasi Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah: 1 dokumen	0,92	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 0,50 0,54 0,92
			Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah: 1 laporan	25,78	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2,05 14,15 21,88 25,78

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro: 3 dokumen	100		
			Penyusunan Rapergub Rencana Induk Kewirausahaan :1 dokumen	6,2	Triwulan I Triwulan III Triwulan III Triwulan IV	6,2 6,2 6,2 6,2
			Rekomendasi Kebijakan KUR: 1 Dokumen	60,32	Triwulan I Triwulan III Triwulan III Triwulan IV	2 37,65 45,88 60,32
			Rekomendasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah: 1 Dokumen	33,48	Triwulan I Triwulan III Triwulan III Triwulan IV	3,15 24,8 29,98 33,48

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegitan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100
2.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan: 3 dokumen	100		
			Penyusunan Grand Design Pengelolaan Sumber Daya Alam: 1 dokumen	14	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 14 14 14
			Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau: 1 dokumen	42	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	14 27 27 42
			Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: 1 dokumen	44	Triwulan I Triwulan II Triwulan III	14 14 29

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegiatan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Triwulan IV	44
3.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	100 100 100 100
3.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha: 1 dokumen Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD: 1 dokumen	100 100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2,76 72,09 90,52 100

No	Sasaran Kegiatan /Sub kegiatan	Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
				Kegiatan/ Sub Kegiatan Fisik (%)	Triwulan	Kegiatan/ Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah: 1 dokumen Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan BLUD: 1 dokumen	100 100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	5,98 69,73 81,99 100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	: Rp.	312.602.300
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	: Rp.	191.625.300
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	: Rp.	120.977.000
1.2 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	: Rp.	188.981.400
a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	: Rp.	188.981.400
1.3 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	: Rp.	41.499.100

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	: Rp.	37.780.500
b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	: Rp.	3.718.600

Jumlah Anggaran : Rp. 543.082.800

Yogyakarta, November 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
SETDA DIY,



YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si
NIP. 196606041993032007

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 056/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2022.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka

memperoleh. *RS*

memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- c. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro;

Susunan organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Substansi Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Pengendalian Inflasi Daerah; dan
 - 2) Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah.
- c. Bagian Rekayasa Perekonomian, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
 - 2) Subbagian Tata Usaha.
- d. Substansi Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian,
 - 1) Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau; dan
 - 2) Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam.
- e. Jabatan fungsional.

7. Gambaran. 

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY telah menggunakan Aplikasi ASN Memayu dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi yang dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY antara lain:
 - Pemanfaatan media sosial untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - Melakukan kerjasama antara Pemda DIY dengan instansi di luar Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta untuk mendukung kerjasama dalam pengelolaan potensi pangan di wilayah DIY serta kerjasama dalam kegiatan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok;
 - Melakukan perluasan cakupan implementasi kebijakan penyerapan pangan lokal sebagai upaya untuk menyerap produk langsung dari GAPOKTAN untuk menjamin serapan produsen dan meningkatkan kesejahteraan produsen;
 - Membuat website KURJogja untuk meningkatkan akses keuangan di daerah melalui digitalisasi layanan pengajuan kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat DIY;

- Kebijakan akses perbankan bagi petani dengan Kartu Tani yang merupakan kebijakan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain kebijakan kemudahan akses penyediaan bantuan sarana produksi (saprodi) khususnya pupuk bersubsidi.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY telah menindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan di tingkat internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas program dan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk evaluasi kinerja secara menyeluruh.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memperoleh nilai sebesar 84,84. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,27 atau 90,90% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,55 atau 88,50% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,61 atau 77,38% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,42 atau 77,67% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga sehingga pada masa selanjutnya kinerja yang telah dicapai dapat ditingkatkan;

b. Meningkatkan

- b. Meningkatkan peran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah DIY.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memperoleh nilai 84,84. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTOR
MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP-19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

